

SINOPSIS

Salah satu dampak diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah kewenangan daerah yang semakin luas dibidang pengelolaan kepegawaian. Kualitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Di sisi lain, adanya adanya perubahan masyarakat yang semakin kritis menuntut setiap Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan disiplin, loyalitas dan kinerjanya. Kabupaten Buru sebagai daerah otonom yang secara administratif menjadi salah satu bagian wilayah Provinsi Maluku masih menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan kualitas atau kompetensi PNS. Oleh karena itu, Badan Kepegawaian Daerah sebagai perangkat pendukung instansi Pemerintah Kabupaten Buru yang berwenang menangani masalah kepegawaian, pada tahun 2007 telah merumuskan program pengembangan sumber daya aparatur sebagai salah satu program prioritas.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Buru dalam pengembangan sumber daya aparatur tahun 2007 dan mengetahui faktor pendukung serta penghambat yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Buru dalam melaksanakan perannya tersebut. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu berusaha menggambarkan secara jelas dan mendetail tentang obyek/kajian penelitian berdasarkan data-data yang terkumpul di lapangan dan diperkuat dengan studi literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BKD Kabupaten Buru dalam pengembangan sumberdaya aparatur tahun 2007, antara lain: peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan, pendidikan dan kedinasan, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta pembinaan aparatur. Terdapat tiga faktor pendukung pelaksanaan peran BKD Kabupaten Buru dalam pengembangan sumber daya aparatur, yaitu : sumberdaya aparatur daerah yang semakin diperhatikan, adanya perubahan paradigma kualitas sumber daya aparatur sebagai salah satu isu utama semangat otonomi daerah, pimpinan semakin menyadari tentang pentingnya peran atasan dalam meningkatkan motivasi kerja para bawahannya. Sedangkan faktor penghambat, antara lain: bentuk dan struktur organisasi yang masih bersifat konvensional, rekrutmen pegawai belum sepenuhnya mengacu kepada kompetensi SDM-PNS sesuai dengan kebutuhannya, keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia dan masih terbatasnya jumlah pengajar dan institusi yang profesional dan berpengalaman dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pegawai yang ada di wilayah Kabupaten Buru.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka disarankan peran pengembangan sumber daya aparatur daerah dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan serta lebih diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas kerja dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang *good government* dan pelayanan publik yang berorientasi pada keruasnan publik (*public*